

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keraton berasal dari kata “rat” mendapat awalan “ka” atau “ke” dan akhiran “an” mempunyai arti tempat tinggal ratu¹, pusat pemerintahan ratu, atau ibu kota kerajaan. Sedangkan kerajaan berasal dari kata “raj” mendapat awalan “ke” atau “ka” dan mendapat akhiran “an” mempunyai arti tempat tinggal raja yang erat hubungannya dengan daerah atau wilayah kekuasaan raja.² Menurut Darsiti Soeratman arti keraton memiliki beberapa makna, antara lain yang pertama negara atau kerajaan dan yang kedua yaitu pekarangan raja, meliputi wilayah di dalam cepuri (tembok yang mengelilingi halaman). Pada intinya Darsiti Soeratman menyebutkan bahwa keraton yaitu ruang lingkup tempat kediaman raja.³

Salah satu keraton yang masih ada di Indonesia adalah Keraton Surakarta Hadiningrat.⁴ Keraton Surakarta didirikan oleh Ingkang Sinuhun

¹ Istilah “Ratu” dari kata dasar (Jawa: lingga) “RAT”, artinya dunia, jagad, buwana, bumi atau masyarakat. Ratu merupakan istilah/nama asli Jawa (Jawa deles). Sri Winarti, *Sekilas Sejarah Karaton Surakarta*, Surakarta: Cendrawasih, 2004, hlm. 43.

² Sri Hartatinningtyas, *Gelar, dan Ageman Pisowan Surakarta Hadiningrat*, Surakarta: Intermedia Paramadina, 2010, hlm. 1.

³ Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Tamansiswa, 1989, hlm. 1.

⁴ Selanjutnya disebut Keraton Surakarta.

Kanjeng Susuhunan Paku Buwana II⁵ pada Rabu, 17 Februari 1745 sebagai pengganti Keraton Kartasura yang telah hancur karena serangan dari pemberontak. Sejarah dari tanggal berdirinya Keraton Surakarta diambil dari kepindahan Keraton Surakarta ke Desa Solo.⁶

Sejarah berdirinya Keraton Surakarta tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Keraton Mataram. Keraton Mataram awal mula berdiri di Kotagede pada tahun 1585 yang kemudian hancur karena serangan dari Trunojoyo kemudian dipindahkan di Kartasura pada tahun 1677. Akibat adanya pemberontakan dilakukan oleh orang-orang Cina berkulit kuning yang menginginkan kedudukan di Keraton Kartasura.⁷ Perpindahan keraton dari Kartasura ke Surakarta dilakukan oleh Paku Buwana II dengan sengkalan: *Kombuling Pudyakapyarsihing Nata* atau 1670 Jawa atau 17 Februari 1745 Masehi.⁸

Paku Buwana II berhasil merebut kembali Keraton Kartasura dari kaum pemberontak. Akibat dari peristiwa tersebut, Keraton Kartasura dalam keadaan rusak sehingga membuat Paku Buwana II memindahkan ke Desa Solo dengan berbagai pertimbangan. Keraton di Desa Solo itu diberi nama

⁵ Selanjutnya disebut Paku Buwana II.

⁶ Pada masa pemerintahan Susuhunan Paku Buwana II, Keraton Surakarta pindah ke desa Solo, karena di Kartasura terjadi pemberontakan orang-orang Cina (geger pecinan) yang berhasil menduduki Keraton Kartasura. Lihat Puspaningrat, *Putra Putri Dalem Karaton Surakarta*, Surakarta: Cendrawasih, 2006, hlm. 7.

⁷ Peristiwa tersebut dikenal dengan nama peristiwa geger pecinan.

⁸ Sri Hartatinningtyas, *op.cit.*, hlm. 3.

Keraton Surakarta sedangkan keraton di Kartasura diganti namanya menjadi Wanakarta.⁹

Keraton Surakarta diperintah oleh seorang Ratu Jawa yakni Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Paku Buwana Senopati Ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayidin Panatagama.¹⁰ Paku Buwana memerintah secara turun-temurun berdasarkan hak asal-usul atau hak tradisional dan bersifat istimewa, memerintah sejak jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia.¹¹ Sifat pemerintahan yang turun-temurun dari ratu sebelumnya ke ratu berikutnya berdasarkan hak asal-usul yang telah ada sebelum terbentuknya Negara Indonesia merupakan keistimewaan dari Keraton Surakarta yang membedakan dengan bentuk pemerintahan lainnya dan keraton selalu berhubungan dengan jabatan ratu untuk membedakan dengan bentuk pemerintahan yang lainnya.

Keraton Surakarta memiliki berbagai peninggalan yang dijadikan pusaka, salah satu peninggalannya yaitu Radya Laksana. Radya artinya negara dan laksana artinya perjalanan yang tulus lahir dan batin.¹² Makna dari lambang keraton tersebut yaitu menjadi tuntunan hidup dengan tatanan budaya Jawa.

⁹ Anonim, *Diorama Kraton Surakarta Hadiningrat*, Surakarta, 2001, hlm. 1.

¹⁰ Merupakan gelar ratu yang memerintah Keraton Surakarta.

¹¹ Sri Winarti, *loc.cit.*

¹² Sri Hartatinningtyas, *op.cit.*, hlm. 5.

Pada bulan Juni tahun 2004 Keraton Surakarta mengalami permasalahan mengenai pewaris tahta yang mengakibatkan terjadinya raja kembar yaitu adanya dua raja yang berkuasa di Keraton Surakarta. Pengunaan istilah raja kembar ini sudah ada sejak Amangkurat II. Konflik raja kembar terjadi kembali di Keraton Surakarta. Terjadinya raja kembar Keraton Surakarta berawal sejak meninggalnya Paku Buwana XII pada 12 Juni 2004.

Konflik tersebut dipicu oleh persengketaan di antara 35 anak Paku Buwana XII dari enam orang selir. Persengketaan tersebut mengenai siapa yang berhak menduduki tahta berikutnya setelah meninggalnya Paku Buwana XII. Dalam tradisi kerajaan Jawa, pengganti raja yang meninggal adalah anak lelaki tertua dari permaisuri, sementara sampai Paku Buwana XII meninggal tidak mengangkat seorang permaisuri. Perebutan tahta terjadi antara Kanjeng Gusti Pangeran Harya¹³ Hangabehi dan KGPH Tedjowulan yang lahir dari ibu yang berbeda.

Perebutan tahta Keraton Surakarta mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2004 di mana Kubu Tedjowulan mengukuhkan perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) tersebut sebagai Paku Buwana XIII. Penobatan Tedjowulan dilakukan di Ndalem Sasana Purnama, Kotabarat Mangkubumen. Lokasi berada sekitar enam kilometer dari kompleks Keraton Surakarta. Pengukuhan dilakukan di luar keraton karena pada hari itu Kubu KGPH Hangabehi menggembok pintu gerbang keraton dan sebulan kemudian melakukan tindakan sama yaitu melantik KGPH Hangabehi juga sebagai Paku

¹³ Selanjutnya disingkat KGPH

Buwana XIII. Adanya pelantikan KGPH Hangabehi dan Tedjowulan dalam waktu dan tempat yang berbeda menyebabkan adanya anggapan adanya raja kembar di Surakarta.

Penetapan pengganti Paku Buwana XII ini berdampak pada kelangsungan hidup keraton. Berbagai bantuan untuk perawatan dan pengembangan budaya yang diterima, baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Surakarta menjadi terhenti. Pemerintah Daerah selalu meminta agar persoalan dua raja itu diselesaikan terlebih dahulu sebelum dana bantuan untuk perbaikan Keraton Surakarta dapat dicairkan.

Konflik pengganti Paku Buwana XII semakin meruncing. KGPH Tedjowulan berusaha untuk menembus pintu Keraton Surakarta yang sudah ditutup oleh KGPH Hangabehi, namun usaha tersebut menghasilkan kegagalan. KGPH Tedjowulan akhirnya lebih memilih untuk tinggal di luar keraton dan KGPH Hangabehi tetap bertahta di dalam Keraton serta diakui secara *de facto*¹⁴ menjadi Paku Buwana XIII. KGPH Hangabehi juga melakukan serangan balik terhadap KGPH Tedjowulan dan peristiwa ini merupakan awal memudarnya citra keraton. Hal ini terlihat dari ikatan darah, tata krama, dan nilai sosial tidak dapat menyatukan kedua putra Paku Buwana XII tersebut.

Solusi menyelesaikan masalah ini timbul dari Kubu KGPH Tedjowulan yang menawarkan rekonsiliasi kepada Kubu KGPH Hangabehi untuk

¹⁴ Berdasarkan kenyataan. Lihat Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indoesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, hlm. 76.

mengakhiri konflik raja kembar Keraton Surakarta. Rekonsiliasi juga bertujuan untuk menyelamatkan bangunan keraton yang sebagian besar mengalami kerusakan akibat konflik tersebut. Niat baik dari Kubu KGPH Tedjowulan ditolak oleh Kubu KGPH Hangabehi dengan alasan KGPH Tedjowulan dianggap sebagai anak durhaka yang seharusnya diberi hukuman.

Menyikapi permasalahan tersebut KGPH Puger selaku putera dalem menyatakan dimulai dari melihat polemik adat yang ada dalam tubuh NKRI, seharusnya pemerintahan Republik Indonesia saling mengadakan komunikasi dengan pihak keraton serta mengerti tiga yuridis formal yang terdiri dari yuridis sejarah, yuridis hukum, dan yuridis politis. Dari ketiga yuridis tersebut harus terjadi kesatuan agar benar-benar mampu memahami adat. Polemik yang ada di Keraton Surakarta terjadi karena adanya emosi dalam diri, menginginkan hak yang seharusnya bukan menjadi hak, kurang paham terhadap jalannya tatanan, serta adanya sikap individual.¹⁵

Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai konflik raja kembar sebab merasa tertarik dan ingin mengetahui perjalanan konflik yang terjadi cukup lama dan belum ada penyelesaian secara menyeluruh maksudnya masih ada pihak Keraton Surakarta yang sebenarnya tidak menyetujui adanya rekonsiliasi. Daya tarik dari konflik raja kembar ini yaitu sebuah permasalahan yang dipicu karena tidak diangkatnya permaisuri oleh Paku Buwana XII. Konflik ini perlu diteliti secara lebih mendalam agar mampu memberikan

¹⁵ Sejarah lisan, hasil wawancara dengan KGPH Puger selaku Putera Dalem Keraton Surakarta, bertempat di Sitiinggil Keraton Surakarta, pada hari Selasa 28 Februari 2012, pukul 13.20 WIB.

analisa terkait adanya konflik yang berkepanjangan tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat mengambil hikmah positif dari adanya konflik ini diantaranya jangan sampai persaudaraan terpecah belah hanya karena ingin memperoleh kekuasaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sekilas riwayat Keraton Surakarta?
2. Bagaimana konflik raja kembar Kasunanan Surakarta?
3. Bagaimana kehidupan Keraton Surakarta pasca konflik?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Khusus
 - a. Mengetahui riwayat Keraton Surakarta.
 - b. Mendeskripsikan konflik raja kembar Kasunanan Surakarta.
 - c. Menjelaskan mengenai kehidupan Keraton Surakarta pasca terjadinya konflik.
2. Tujuan Umum
 - a. Mampu mengembangkan kemampuan merangkai fakta-fakta sejarah dan melatih berpikir logis, kritis, analitis, dan objektif dalam mengkaji suatu peristiwa serta diharapkan mampu memahami makna yang terkandung dalam suatu peristiwa.
 - b. Menerapkan metode penelitian sejarah dan historiografi yang didapat pada waktu mengikuti perkuliahan.

- c. Menambah pengetahuan seputar seluk-beluk pemerintahan di Keraton Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

- 1. Bagi Penulis
 - a. Menjadi tolak ukur kemampuan penulis untuk mengetahui kemampuan dalam merekonstruksi peristiwa sejarah dalam bentuk karya tulis.
 - b. Penulis memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang peristiwa yang terjadi dalam pemerintahan Keraton Surakarta.
 - c. Penulis menggunakan penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.
- 2. Bagi Pembaca
 - a. Setelah membaca karya tulis ini pembaca diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai sejarah Keraton Surakarta dan mengenai seluk-beluk tatanan pemerintahan Keraton Surakarta.
 - b. Pembaca memperoleh gambaran mengenai proses terjadinya konflik raja kembar Kasunanan Surakarta dan mampu mengambil makna dari adanya konflik.
 - c. Pembaca memperoleh gambaran mengenai pengaruh konflik raja kembar Kasunanan Surakarta dalam berbagai bidang terhadap keadaan Keraton Surakarta serta diharapkan mampu memperkaya khasanah penelitian mengenai sejarah lokal yang memberikan sumbangan kepada sejarah nasional.

E. Kajian Pustaka

Penulisan sebuah karya ilmiah memerlukan suatu kajian pustaka untuk memperkuat data-data atau teori yang menjadi landasan bagi penulis. Kajian pustaka merupakan telaah pustaka terhadap literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penulisan.¹⁶ Dalam kajian pustaka, penulis menggunakan pustaka-pustaka atau literatur yang digunakan dalam penulisan sejarah. Kajian pustaka merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah berdasarkan sumber-sumber yang telah ditemukan atau sumber yang ada.

Penulis membahas mengenai konflik yang terjadi dalam pemerintahan Kasunanan Surakarta, khususnya antara KGPH Hangabehi dan KGPH Tedjowulan pada tahun 2004. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh faktor perebutan kekuasaan. Akibat dari konflik tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan Keraton Surakarta. Konflik ini tidak begitu berpengaruh terhadap masyarakat Surakarta karena kurangnya partisipasi masyarakat Surakarta terhadap Keraton Surakarta.

Adapun literatur yang penulis gunakan untuk mengkaji rumusan masalah yang pertama mengenai sejarah berdirinya Keraton Surakarta menggunakan sumber buku, salah satunya karya Sri Winarti. (2004). *Sekilas Sejarah Karaton Surakarta*. Surakarta: Cendrawasih. Literatur yang digunakan untuk rumusan masalah yang kedua mengenai konflik raja kembar Keraton Surakarta yaitu buku dan media massa. Adapun sumber buku yang

¹⁶ Daliman, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY, 2006, hlm. 3.

digunakan yaitu Mulyanto dkk. (2004). *Di Balik Suksesi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat*. PT. Aksara: Solo, sedangkan sumber dari media massa yang digunakan yaitu diantaranya “KGPH Hangabehi Diprediksi Paling Berpeluang”, dalam Koran Solopos, tanggal 21 Juni 2004.

Literatur yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga mengenai Keraton Surakarta pasca konflik juga menggunakan sumber dari media massa yaitu diantaranya “Dua Raja Berdamai”, dalam Koran Solopos, tanggal 18 Mei 2012 serta “Insiden Kecil Warnai Jumengan PB XIII (Tedjowulan akhirnya Masuk Kraton)”, dalam Koran Solopos, tanggal 16 Juni 2012.

Berdirinya Keraton Surakarta berawal dari terjadinya pemberontakan tahun 1742 oleh orang-orang Cina yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi¹⁷ di Kartasura. Pemberontakan tersebut disebut dengan geger pecinan. Pada saat pemberontak menduduki Keraton Kartasura yang pada saat itu dipimpin oleh Paku Buwana II, Paku Buwana II beserta abdi dalem mengungsi ke Ponorogo untuk menyelematkan diri.

Paku Buwana II melakukan perlawanan dan berhasil merebut kembali Kasunanan Kartasura. Akibat adanya perlawanan tersebut, keadaan Keraton Kartasura menjadi rusak. Melihat keadaan keraton yang sudah rusak Paku Buwana II memindahkan Keraton Kartasura ke Desa Solo. Paku Buwana II memberi nama keraton di Desa Solo menjadi Keraton Surakarta.

¹⁷ Raden Mas Gerendi adalah cucu dari Hamangkurat II. Sri Winarti, *op.cit.*, hlm. 15.

Catatan sejarah Keraton Surakarta terjadi saat pergantian kepemimpinan yang meneruskan perjalanan pemerintahan Paku Buwana XII. Pada Jum'at, 10 September 2004 KGPH Hangabehi putra tertua almarhum Paku Buwana XII dari 35 anak yang lahir dari enam selir menobatkan diri sebagai penerus dengan gelar Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwana XIII.¹⁸

Masyarakat menganggap lahirnya raja baru bukan lagi penerus kelangsungan budaya keraton namun peristiwa istimewa dan berita besar di sejumlah media cetak dan elektronik sebab bersamaan dengan bertahtanya KGPH Hangabehi, muncul adik KGPH Hangabehi yaitu KGPH Tedjowulan yang lahir dari ibu yang berbeda, juga mengklaim dirinya sebagai Paku Buwana XIII. Peristiwa tersebut membuat citra Keraton Surakarta menjadi pudar.

Titik temu seakan tidak bisa didapatkan bagi kedua pihak untuk mengakhiri perseteruan. Bagi yang sedang menjalankan pranata adat di dalam keraton, munculnya raja di luar keraton itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran adat yang layak mendapatkan hukuman setimpal.¹⁹ Kelompok Tedjowulan tetap tidak mengakui KGPH Hangabehi sebagai Paku Buwana XIII sebab proses kenaikan tahta beliau dianggap tidak sah dengan alasan

¹⁸ Selanjutnya disebut Paku Buwana XIII.

¹⁹ Won Poerwono. *Terbitnya "Matahari Kembar" di Keraton Surakarta*. [Http://www.suaramerdeka.com/harian/0412/29/slo04.htm](http://www.suaramerdeka.com/harian/0412/29/slo04.htm). Diakses Rabu 8 Januari 2012 pukul 13.51 WIB.

dalam pengukuhan KGPH Hangabehi tidak didukung tiga pengageng Keraton Surakarta yang merupakan lembaga resmi Keraton Surakarta.

Konflik ini membawa dampak di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, dan politik. Dampak dalam bidang ekonomi, berbagai bantuan untuk perawatan dan pengembangan budaya yang diterima baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Surakarta menjadi terhenti. Dampak dalam bidang sosial, membuat memudarnya citra dan adat-istiadat Keraton Surakarta di mata masyarakat luas. Dampak dalam bidang politik, tatanan dalam Keraton Surakarta tidak berjalan sesuai dengan adat-istiadat.

Konflik yang berlangsung cukup lama ini mulai menemukan titik terang dalam penyelesaian melalui jalan rekonsiliasi yang diajukan oleh KGPH Tedjowulan. KGPH Tedjowulan akhirnya bersedia untuk melepas gelar Paku Buwana XIII. Walaupun gelar tersebut sudah dilepas, KGPH Tedjowulan memperoleh jabatan sebagai wakil raja mendampingi KGPH Hangabehi sebagai Paku Buwana XIII. Rekonsiliasi yang diajukan oleh KGPH Tedjowulan tidak semua pihak Keraton Surakarta menyetujuinya secara hati namun proses rekonsiliasi tetap berjalan. Rekonsiliasi membawa dampak positif yang cukup besar bagi Keraton Surakarta.

F. Historiografi yang Relevan

Historiografi merupakan salah satu hal terpenting dalam penulisan sebuah karya sejarah. Historiografi adalah usaha merekonstruksi sejarah dengan mengerahkan seluruh daya pikiran, keterampilan teknis, penggunaan

pikiran teknis, penggunaan kutipan dan catatan, serta yang paling utama adalah penggunaan pikiran kritis dan analisa yang akhirnya menghasilkan suatu sintesa dari seluruh hasil penelitian secara utuh.²⁰ Historiografi yang relevan bertujuan menjamin keaslian suatu karya sejarah, dapat membantu rekonstruksi sejarah, dan sebagai bahan referensi serta perbandingan.

Historiografi yang relevan merupakan salah satu hal pokok dalam penulisan sejarah dengan tujuan agar dapat membedakan tulisan dari penulis sebelumnya dan penulisan sejarah lain dalam skripsi ini. Historiografi yang relevan dalam hal ini dapat berupa buku, desrtasi, tesis, ataupun skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan berpedoman pada karya-karya yang memenuhi syarat diharapkan suatu karya sejarah yang bersifat objektif. Dalam penulisan skripsi yang berjudul Konflik Raja Kembar Kasunanan Surakarta (2004-2012), penulis menggunakan sumber yang relevan berupa skripsi yang sejenis.

Pertama berupa skripsi yang berjudul “Suksesi Kasunanan Surakarta: Masalah Pengertian Tahta Paku Buwono X (1898-1939)” ditulis oleh Fitri Ratnasari dari Jurusan Ilmu Sejarah, FISE, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2001. Skripsi ini menjelaskan tentang kondisi Kasunanan Surakarta pada masa Paku Buwana X yang mengalami kemajuan yang sangat pesat baik dalam lingkup internal, yaitu secara berkesinambungan struktur pemerintahan disempurnakan maupun lingkup eksternal, yaitu adanya pembangunan di

²⁰ Helius Sjamsuddin , *Metodologi Sejarah*, Jakarta: Depdikbud, 1994, hlm. 153.

berbagai bidang untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun kebesaran dalam pemerintahan Paku Buwana X tersebut tidak diikuti dengan keberuntungan Paku Buwana dalam hal penggantinya kelak. Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pemerintahan Paku Buwana, sedangkan perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis membahas sekilas tentang pemerintahan Paku Buwana XII.

Kedua berupa skripsi yang berjudul “Berdirinya Keraton Surakarta (1744-1745)” ditulis oleh Isnand Amaludin dari Jurusan Ilmu Sejarah, FISE, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2001. Skripsi ini menjelaskan tentang berdirinya Keraton Surakarta tahun 1774-1745 serta situasi Mataram pada periode akhir Kartasura ke Surakarta dan bagaimana dampak dari perpindahan keraton bagi masyarakat Mataram. Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas mengenai riwayat Keraton Surakarta, sedangkan perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini hanya membahas sekilas mengenai sejarah berdirinya Keraton Surakarta dan membahas mengenai perkembangan Keraton Surakarta pada tahun 2004.

G. Metode Penelitian

Sejarah memiliki metode yang dipergunakan para sejarawan untuk merekonstruksi masa lalu. Metode merupakan cara atau prosedur untuk memperoleh objek. Metode dapat dikatakan cara untuk melakukan sesuatu dalam sistem yang terencana dan teratur. Pada intinya metode erat kaitannya dengan prosedur, proses, atau teknik yang sistematis untuk melakukan

penelitian dan mendapatkan objek penelitian. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.²¹

Metode sejarah merupakan alat bantu sejarawan dalam bentuk prinsip dan aturan tentang prosedur kerja untuk memperoleh objek. Metode penulisan ini menggunakan tahap penelitian menurut Kuntowijoyo yang terbagi menjadi lima bagian yaitu antara lain pemilihan tema, mengumpulkan sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penggunaan metode memiliki tujuan menghasilkan tujuan yang objektif meskipun subjektifitas dalam penulisan sejarah tidak dapat dihindari. Adapun lima tahapan tersebut yaitu:

1. Pemilihan Tema

Pemilihan tema merupakan langkah pertama dalam sebuah penelitian dengan tujuan dapat menentukan permasalahan yang akan dikaji. Pemilihan tema menjadi faktor utama sebab apabila penulis merasa senang dan suka terhadap tema yang dipilih maka penulis akan mengerjakan dengan baik. Dalam menentukan topik penelitian yang berjudul Konflik Raja Kembar Kasunanan Surakarta (2004-2012), penulis mempertimbangkan alasan dalam pemilihan judul tersebut.

Pertama, konflik yang terjadi di Keraton Surakarta merupakan bentuk perkembangan Keraton Surakarta dari masa ke masa yang menunjukkan penurunan citra keraton sebagai pusat pengembangan budaya Jawa. Kedua,

²¹ *Ibid*, hlm. 17.

adanya konflik tersebut membuat penulis ingin mengetahui bagaimana seorang putera-puteri dalam Keraton Surakarta dalam menyikapi permasalahan adanya raja kembar. Ketiga, penulis ingin mendapatkan pengalaman dengan adanya usaha untuk interaksi dengan pihak-pihak Keraton Surakarta.

2. Mengumpulkan Sumber (heuristik)

Mengumpulkan sumber sejarah adalah tahap lanjutan setelah tema dipilih.²² Berkaitan dengan tahap heuristik ini, penulis melakukan pencarian buku-buku, surat kabar, tulisan hasil penelitian yang relevan, dan sumber internet terkait dengan objek penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam merekontruksi sebuah peristiwa, sumber sejarah merupakan hal yang sangat penting sebab tanpa sumber sejarah maka karya sejarah akan menjadi fiksi belaka, namun dengan adanya sumber sejarah maka akan memperoleh sumber sejarah yang sesungguhnya. Sumber sejarah ialah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu.²³

Sumber sejarah dapat diklasifikasikan berdasarkan garis besar, bentuk, dan sifatnya. Berdasarkan garis besarnya dibagi menjadi sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dokumenter dan lisan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengutamakan

²² Suhartono Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 15.

²³ Helius Sjamsuddin, *op.cit.*, hlm. 70.

sumber tertulis dan lisan. Sedangkan menurut sifatnya terbagi menjadi sumber primer dan sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer adalah kesaksian dari seseorang saksi dengan panca indra yang lain atau alat mekanis seperti diktafon, yaitu orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya yang selanjutnya disebut sebagai saksi mata.²⁴ Untuk memperoleh sumber primer, penulis menggunakan metode wawancara dengan sumber yang sezaman diantaranya salah satu putera dalem, pegawai sasana pustaka, dan orang yang meliput dalam media massa Solopos.

Sumber primer yang digunakan yaitu hasil wawancara langsung dengan salah satu putera dalem Keraton Surakarta yaitu KGPH Puger, pegawai sasana pustaka sekaligus selaku anak dari KGPH Puger yang bernama Bandara Raden Mas (BRM) Suryo Asmo, dan Bapak Mulyanto. Sumber primer dalam penulisan skripsi ini tidak dapat melakukan wawancara langsung dengan pelaku dikarenakan akses untuk wawancara cukup sulit.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan kesaksian dari seseorang yang tidak hadir dalam peristiwa yang dikisahkan. Sumber sekunder dalam penulisan skripsi ini menggunakan kajian pustaka dari buku-buku, artikel yang terkait

²⁴ Louis Gottschalk, “Understanding History: A primer of Historical Method”, a.b. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 39.

dengan konflik raja kembar dalam media massa yang diperoleh di Monumen Pers Nasional, serta internet yang berkaitan dan dapat dipertanggung jawabkan. Penulis menggunakan sumber sekunder berupa buku yang diperoleh di beberapa tempat yaitu antara lain perpustakaan pusat Universitas Negeri Yogyakarta, perpustakaan Keraton Surakarta, dan sebagainya. Buku pendukung tersebut antara lain:

Mulyanto dkk. (2004). *Di Balik Suksesi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat*. PT. Aksara: Solo.

Margana. (2004). *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darsiti Soeratman. (2000). *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.

Puspaningrat. (2006). *Putra Putri Dalem Karaton Surakarta*. Surakarta: Cendrawasih.

Sri Hartatinetyas. (2010). *Gelar, dan Ageman Pisowan Surakarta Hadiningrat*. Surakarta: Intermedia Paramadina.

Sri Winarti. (2004). *Sekilas Sejarah Karaton Surakarta*. Surakarta: Cendrawasih.

3. Verifikasi (Kritik Sumber)

Verifikasi merupakan tahap uji keabsahan isi sumber yang telah didapat. Yang penting mengenai kritik adalah otentisitas dan validitas sumber lewat kritik ekstern (luar) dan intern (dalam).²⁵ Kritik ekstern bertujuan untuk mengetahui otentisitas atau keaslian sumber dan kritik eksternal mengarah pada pengujian terhadap aspek luar dari sumber.

²⁵ Suhartono Pranoto, *op.cit.*, hlm. 152.

Otentisitas mengacu pada materi sumber yang sezaman. Dalam skripsi ini penulis melakukan kritik ekstern yaitu melakukan kritik terhadap aspek luar sumber.

Sedangkan kritik intern merupakan kelanjutan untuk mengetahui kredibilitas atau kelayakan sumber. Kritik internal ditujukan untuk memahami isi teks.²⁶ Penulis melakukan kritik intern yaitu melakukan kritik terhadap isi sumber. Pemahaman isi teks diperlukan latar belakang pikiran dan budaya penulisnya. Dari sumber tersebut setelah melakukan verifikasi menghasilkan fakta. Fakta yang diperoleh merupakan kepingan-kepingan dari peristiwa sejarah yang siap untuk direkonstruksi menjadi kisah sejarah.

4. Interpretasi

Interpretasi yaitu penafsiran atas fakta-fakta sejarah yang dikembangkan menjadi kesatuan yang utuh dan bermakna logis. Interpretasi atau penafsiran merupakan bagian yang cukup penting, karena lewat interpretasilah diperoleh sesuatu.²⁷ Dalam tahap penulisan ini penulis dituntut untuk mencermati dan mengungkapkan data-data yang diperoleh, oleh sebab itu dalam interpretasi perlu dilakukan analisis sumber untuk

²⁶ *Ibid*, hlm. 37.

²⁷ *Ibid*, hlm. 153.

mengurangi unsur subyektifitas dalam kajian sejarah. Subyektifitas sejarawan memang diakui akan tetapi harus dihindari.²⁸

5. Historiografi

Secara harfiah “historiografi” berarti pelukisan sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa yang terjadi pada waktu lalu yang disebut sejarah.²⁹ Historiografi merupakan tahap penyajian berupa rekonstruksi dari fakta-fakta sejarah yang ada menjadi satu kesatuan yang kronologis dan objektif dalam bentuk karya ilmiah. Historiografi merupakan tahap akhir yang dilakukan penulis untuk menyajikan sebuah fakta. Hasil dari historiografi ini adalah skripsi yang berjudul “Konflik Raja Kembar Kasunanan Surakarta (2004-2012)”.

Pada tahap historiografi, penulisan sejarah memerlukan kemampuan-kemampuan tertentu untuk menjaga standar mutu cerita sejarah seperti prinsip sereliasi (cara membuat urutan peristiwa) yang mana memerlukan prinsip-prinsip seperti prinsip kronologi (urutan waktu), prinsip kaukasi (hubungan sebab akibat).³⁰ Bahkan juga kemampuan imajinasi (kemampuan untuk menghubungkan peristiwa) yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian yang masuk akal dengan bantuan pengalaman.

²⁸ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 101.

²⁹ Helius Sjamsuddin, *op.cit.*, hlm. 16.

³⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Budaya, 2001, hlm. 99.

H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara menjelaskan suatu penelitian dengan memanfaatkan salah satu aspek ilmu sosial.³¹ Penulis menggunakan pendekatan multidimensional maksudnya menggunakan lebih dari satu pendekatan. Manfaat penggunaan pendekatan multidimensional mampu mengurangi sisi subjektifitas penulis, sebab penulis dapat memandang dari berbagai sudut pandang serta mampu memberi bantuan dalam menganalisis sebuah kejadian. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan politik, sosiologi, dan ekonomi.

Pendekatan politik merupakan pendekatan yang menyoroti segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan yang mempunyai maksud mempengaruhi. Pendekatan politikologis menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan, dan lain sebagainya.³² Pendekatan politik ini menyoroti terjadinya konflik antara KGPH Hangabehi dan Tedjowulan yang dipicu karena faktor kekuasaan dan akhirnya membawa dampak dalam bidang politik.

Pendekatan ekonomi adalah penjabaran dari konsep-konsep-konsep ekonomi sebagai pola distribusi, alokasi produksi, dan konsumsi yang berhubungan dengan sistem sosial dan stratifikasinya yang diungkapkan peristiwa itu atau fakta dalam kehidupan ekonomi sehingga dapat

³¹ Suhartono Pranoto, *op.cit.*, hlm. 136.

³² Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1992, hlm. 4.

dipastikan hukum dan kaidahnya.³³ Pendekatan ekonomi ini digunakan untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat khususnya masyarakat sekitar Keraton Surakarta pasca terjadinya konflik raja kembar Kasunanan Surakarta.

Pendekatan sosiologi meneropong segi-segi sosial peristiwa yang dikaji, seperti golongan-golongan konflik berdasarkan kepentingan-kepentingan ideologis dan lainnya.³⁴ Pendekatan sosiologi memberikan gambaran tentang kondisi nyata masyarakat suatu daerah dilihat dari segi mata pencaharian, pendidikan, kepercayaan, dan lain-lain. Pendekatan sosiologis ini digunakan untuk melihat bagaimana dampak dalam bidang sosial terhadap masyarakat akibat konflik kedua raja Kasunanan Surakarta yang bermasalah tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Konflik Raja Kembar Kasunanan Surakarta (2004-2012)” terdiri dari lima bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi yang

³³ Sidi Gazalba, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu Untuk Tingkat Pengetahuan Menengah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bhratara, 1996, hlm. 33.

³⁴ Sartono Kartodirdjo, 1992, *loc.cit.*

relevan, metode penelitian, pendekatan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai riwayat singkat Keraton Surakarta, Keraton Surakarta masa Paku Buwana XII tahun 1945-2004 yang mana karena beliau tidak mengangkat seorang permaisuri menyebabkan terjadinya perselisihan terkait penetapan pengganti Paku Buwana XII, dan membahas mengenai profil calon pengganti Paku Buwana XII.

Bab ketiga membahas mengenai proses berlangsungnya konflik yang berlangsung cukup lama meliputi pembahasan mengenai KGPH Hangabehi, KGPH Tedjowulan, dan inti konflik raja kembar mulai tahun 2004.

Bab keempat membahas Keraton Surakarta pasca terjadinya konflik dalam berbagai bidang meliputi dampak terhadap Keraton Surakarta, membahas mengenai upaya rekonsiliasi sebagai bentuk perdamaian antara KGPH Hangabehi dengan KGPH Tedjowulan., dan membahas dampak dari rekonsiliasi konflik.

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dari penulisan skripsi ini. Dalam kesimpulan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas mengenai konflik raja kembar yang terjadi di Keraton Surakarta.